

**PROBLEMATIKA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DI DESA KOTO TUO KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR MENURUT FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
(S.H. I)



OLEH

ARMAN
10524001117

**PROGRAM S1
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2010

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ***“Problematika Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Menurut Fiqih Siyasah ”***

Pada Bulan Oktober 2005, Pemerintah menaikkan harga dasar BBM. Kenaikan tersebut mengakibatkan harga kebutuhan pokok meningkat dan bagi masyarakat miskin mengakibatkan daya beli mereka semakin menurun karena akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan harga pasar. Untuk itu diperlukan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah adalah Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) berupa Subsidi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Miskin

Untuk di Desa Koto Tuo program bantuan tunai disalurkan kepada masyarakat yang dikategorikan miskin yang terdaftar di BPS dan juga yang tidak terdaftar di BPS atau hasil dari kebijakan pemerintah desa setempat. Atas dasar data yang diperoleh dari BPS dan kebijakan desa tersebut, maka kantor pos kecamatan menyalurkan dan BLT kepada titik distribusi yang telah ditentukan diwilayahnya. Dari titik distribusi tersebut kemudian bantuan BLT disalurkan kepada masyarakat miskin sebagai penerima bantuan. Setiap rumah tangga miskin pemegang Kartu Kompensasi BBM (KK BBM) akan menerima uang tunai sebesar Rp. 100.000,- setiap bulan. Untuk memudahkan pengambilan BLT diberikan setiap tiga bulan sekali, masing-masing rumah tangga menerima Rp. 300.000.

Berangkat dari hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apa dasar penetapan dan kriteria penerima BLT di Desa Koto Tuo, bagaimana proses penyalurannya dan tinjauan Fiqih Siyasah .

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Koto Tuo yang menjadi populasinya masyarakat miskin sebagai penerima bantuan BLT, sedangkan sampel berjumlah 100 orang sebagai penerima bantuan BLT.

Sementara itu dalam mendapatkan data dilapangan penulis lakukan dengan menggunakan teknik observasi, angket, wawancara dan studi dokumen, yang kemudian penulis analisa dengan menggunakan teknik analisa kualitatif dengan metode induktif, deduktif dan deskriptif.

Dari penelitian yang penulis lakukan didapati bahwa bantuan BLT disalurkan kepada masyarakat yang terdaftar dan tidak terdaftar. Sedangkan dalam pelaksanaan penyaluran tidak sesuai dengan ketentuan. Dimana masyarakat yang menerima bantuan BLT tersebut tidak menerima bantuan seluruhnya, ada yang menerima Rp. 300.000,-, Rp.150.000,- dan Rp.100.000.

Melihat hal diatas, Dalam fiqih siyasah telah diatur bahwa Pemerintah adalah sebagai pemimpin dalam masyarakat dalam arti yang luas bertanggung jawab terhadap keadaan rakyatnya. Sebagaimana terdapat

dalam Sabda Nabi SAW yang artinya : *“setiap kamu adalah pemimpin setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. In adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya”*. (HR. Bukhari, Muslim dan Turmudzi).

HALAMAN JUDUL

ii

NOTA PEMBIMBING

LEMBARAN PENGESAHAN

MOTTO

KATA PENGANTAR----- i

ABSTRAK ----- ii

DAFTAR ISI ----- iii

DAFTAR TABEL----- iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang-----	1
B. Rumusan Masalah -----	10
C. Bataasan masalah -----	10
D. Tujuan Penelitian -----	11
E. Kegunaan Penelitian -----	11
F. Metode Penelitian-----	11
G. Sistimatika Penulisan -----	14

BAB II GAMBARAN UMUM DESA KOTO TUO

A. Geografis dan Demografis -----	16
B. Pendidikan-----	20
C. Mata pencaharian -----	24

BAB III TINJAUAN TEORITIS PENYALURAN

BANTUAN LANGSUNG TUNAI

A. Latar Belakang Bantuan Langsung Tunai -----	26
--	----

B. Bentuk Bantuan	28
C. Dasar Penetapan	29
D. Tujuan dan Sasaran Program BLT	30
E. Kriteria Penerima BLT	31
F. Proses Penyaluran BLT	34

BAB IV PROBLEMATIKA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA

KOTO TUO MENURUT FIQH iv

A. Dasar Penetapan dan Kriteria Bantuan Langsung Tunai di Desa Koto Tuo	36
B. Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	40
C. Tinjauan fiqh siyasah	54

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	63
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan, ternyata bukan sekedar sebuah kata benda atau kata sifat. Kemiskinan telah hadir dalam realitas kehidupan manusia dengan bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kemiskinan telah menjadi sebuah persoalan kehidupan manusia, kemiskinan telah hadir juga dalam berbagai analisis dan kajian yang dilakukan oleh berbagai disiplin ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata dari upaya memberi jawab kepada persoalan kemiskinan.¹ Bahkan tidak hanya sebatas itu, kemiskinan juga telah hadir dalam sejumlah kebijakan baik oleh elemen-elemen sosial masyarakat maupun pemerintah dalam menunjukkan kepedulian bersama untuk menangani persoalan kemiskinan ini.

Untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap persoalan kemiskinan ini, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (RI) tahun 1945, dalam pasal 34 ayat 2 mengatakan : Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.²

Salah satu wujud realisasi dari UUD tersebut, Pemerintah RI, menuangkannya kedalam :

¹ Diah Luthfi Hidayati, Bantuan Langsung Tunai (BLT) upaya membangun kesadaran teologis terhadap persoalan kemiskinan di Indonesi, *anank.files.wordpress.com/2008/06/makalah-bltdi4h.doc*.

² Undang-Undang Dasar 1945 dan Amendemen Kabinet Indonesia Bersatu Periode 2004-2009, h. 33.

1. Keputusan Presiden RI No. 12 tahun 2005, tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) di seluruh Indonesia.³
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tanggal 14 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran (yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.⁴

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008, maka Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin dinyatakan tidak berlaku lagi.⁵

Kepres ini mengintruksikan kepada para Menko, tujuan menteri, jaksa agung, panglima TNI, kapolri, Gubernur, Bupati/Wali kota, kepala BPS dan kepala BKKBN untuk melaksanakan program tersebut. Tujuan yang diharapkan melalui kebijakan program ini adalah untuk dapat mengurangi beban hidup rumah tangga miskin atas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) 1 Oktober 2005, pemerintah berupaya memberikan Subsidi Langsung Tunai (SLT) atau sering disebut dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT)⁶ kepada rumah tangga miskin khususnya Desa Koto Tuo, dengan sejumlah uang yang

³ Keputusan Presiden RI, Nomor 12 tahun 2005 Tanggal 10 September 2005. *Tentang Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin.*

⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran.

⁵ *Ibid*

⁶ Untuk selanjutnya di guna singkatan BLT

diberikan pemerintah kepada rumah tangga yang tergolong miskin sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM. Setiap rumah tangga miskin pemegang Kartu Kompensasi BBM (KK BBM) akan menerima uang tunai sebesar Rp. 100.000, setiap bulan. Untuk memudahkan pengambilan BLT diberikan setiap tiga bulan sekali, masing-masing rumah tangga menerima Rp. 300.000,-.

Adapun kriteria penerima BLT yang telah ditetapkan Instansi Pemerintah Pusat yaitu Departemen Keuangan, Badan Pembangunan Nasional, Menteri Koordinasi Pembangunan dan BPS mengeluarkan 14 kriteria rumah tangga miskin yaitu :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi untuk masing-masing anggota keluarga.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu berkualitas rendah.
3. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah.
4. Fasilitas jamban tidak ada, atau ada tetapi dimiliki secara bersama-sama dengan keluarga lain.
5. Sumber air untuk minum/memasak berasal dari sumur/mata air tak terlindung, air sungai, danau, atau air hujan.
6. Sumber penerangan di rumah bukan listrik.
7. Bahan bakar yang digunakan memasak berasal dari kayu bakar, arang, atau minyak tanah.

8. Dalam seminggu tidak pernah mengonsumsi daging, susu, atau hanya sekali dalam seminggu.
9. Dalam setahun paling tidak hanya mampu membeli pakaian baru satu stel.
10. Makan dalam sehari hanya satu kali atau dua kali.
11. Tidak mampu membayar anggota keluarga berobat ke puskesmas atau poliklinik
12. Pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan setengah hektar, buruh tani, kuli bangunan, tukang batu, tukang becak, pemulung, atau pekerja informal lainnya dengan pendapatan maksimal Rp 600 ribu per bulan.
13. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga bersangkutan tidak lebih dari SD.
14. Tidak memiliki harta senilai Rp 500 ribu seperti tabungan, perhiasan emas, TV berwarna, ternak, sepeda motor (kredit/non-kredit), kapal motor, tanah, atau barang modal lainnya.⁷

Selain 14 poin di atas, anggota rumah tangga yang bekerja sebagai PNS, anggota TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD, pensiunan PNS/TNI/ Polri, maka keluarga tersebut tidak berhak mendapat BLT.

Sejak diluncurkan, program ini telah mengundang pro dan kontra. Berbagai sisi dari program ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan, baik masalah persiapannya, seperti proses pendataan masyarakat miskin, penetapan

⁷Badan Pusat Statistik, <http://blogberita.net/2008/06/05/14-syarat-warga-miskin-penerima-blt>.

kriteria miskin. Sisi lain adalah masalah sosialisasi yang dilaksanakan sebelum pelaksanaannya sangat kurang sehingga informasi yang diterima masyarakat menjadi simpang siur. Kesimpang-siuran informasi ini menimbulkan mis komunikasi antar para pihak pelaku program BLT .

Dengan demikian, ternyata realisasi dan realitas program BLT banyak mengalami kendala-kendala, persoalan-persoalan, dan juga dengan adanya BLT justru menyebabkan banyak warga masyarakat memilih menjadi anggota keluarga miskin.⁸ Sehingga banyak terdapat orang-orang yang tidak merasa malu mengaku miskin hanya karena menginginkan BLT, harga diri tidak lagi jadi pertimbangan utama, demi perebutan status miskin. Berbagai manipulasi kemiskinan yang dulu dimainkan Orde Baru, telah menyebar ke masyarakat dan menjadi sesuatu yang lumrah. Ketika menjadi sesuatu yang lumrah, rasa malu sudah tidak relevan lagi.

Sehingga warga yang seharusnya sangat miskin (tingkatannya di bawah keluarga miskin) justru tidak dapat dana BLT hanya karena tidak mendapatkan kartu BLT.⁹ Dengan demikian Miskin dijadikan senjata untuk mencapai tujuan.

Inilah dari kondisi penyakit sosial yang berat untuk di hilangkan, dan diperparah oleh sistem yang salah kaprah. BLT muncul sebagai virus

⁸ *Ibid*

⁹ Zen Habibi (Kepala Dusun I) , *Wawancara*, di Desa Koto Tuo, 17 Oktober 2009

psikososial yang dapat melumpuhkan potensi sumber daya manusia (SDM) dalam masyarakat.¹⁰

Dalam kondisi terjadinya ketimpangan ekonomi, pemberian subsidi yang asalnya boleh, menjadi wajib hukumnya, karena mengikuti kewajiban syariah untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi (*at-tawazun al-iqtishadi*)¹¹. Hal ini karena Islam telah mewajibkan beredarnya harta di antara seluruh individu dan mencegah beredarnya harta hanya pada golongan tertentu sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Asyr (59) : 7)

كَى لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَ

*Artinya : Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. (QS al-Hasyr (59) : 7).*¹²

Oleh karen itu, dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tanggal 1 Oktober 2005 menambah beban hidup dan kehidupan masyarakat terutama masyarakat miskin, subsidi BBM tidak sekadar boleh, tetapi sudah wajib hukumnya, agar ketimpangan di masyarakat antara kaya dan miskin tidak semakin lebar. Isyarat-isyarat dalam al-Quran dan hadist Nabi

¹⁰ "Dampak Psikososial Bantuan Langsung Tunai (BLT)" Artikel diakses dari internet dengan alamat website : <http://www.sinar-harapan.co.id/203/makalah-essai/2007> pada hari kamis, 26 Juni 2008 Pkl. 15.00 WIB.

¹¹<http://74.125.153.132/search?q=cache:uybcF9Umcu4J:hati.unit.itb.ac.id/%3Fp%3D16+BLT+DALA>, Oleh: Shiddiq al-Jawie, Mai 28, 2008

¹²Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta:Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan/Pentafsiran Al-Quran:, 1971), h .916.

menunjukkan bahwa agama Islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada fakir miskin dan kaum *Mustad'afin* (lemah) pada umumnya, kepedulian inilah yang harus menjiwai kebijakan penguasa (*ulil amri*) agar rakyat terbebas dari kemiskinan.

Pada masa khalifah Umar Bin Khattab sumber subsidi/bantuan ini adalah penambahan pemasukan pajak, *khraj*, *jizyah*, dan harta *fai*. Sistem ini tidak memakai harta zakat, karena harta zakat dibagikan menurut distrik dan tidak diberikan kepada Baitul Mal, kecuali kelebihan dipakai untuk untuk masyarakat yang membutuhkan seperti orang miskin. Karena zakat mempunyai kepentingan pengeluaran khusus menurut al-Quran.¹³

Di sisi lain, tugas Baitul Mal, hanya membagikan harta kepada orang yang menjadi penerima dan juga harus mengembalikan harta sesuai dengan kemaslahatan umum. Karena di dalam harta yang dikumpulkan terdapat hak-hak fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya, tujuannya adalah untuk kemaslahatan umum.¹⁴

Perhatian Umar atas kesejahteraan rakyat tidak kalah pentingnya dari pada perhatiannya terhadap kesejahteraan para pejabat dan pegawainya. Untuk itu, ia pergi seorang diri mengadakan perjalanan keliling untuk melihat keadaan kesejahteraan rakyat yang sebenarnya. Riwayat yang terkenal menceritakan, pada suatu malam perjalanan kelilingnya, Umar menemukan

¹³ Quthb, Ibrahim, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Cet. ke-2, h, 189.

¹⁴ *Ibid*, h. 209

satu keluarga di mana sang Ibu tampak sedang merebus sesuatu, sementara anaknya amat lapar. Ketika ia mengetahui bahwa sebenarnya yang direbus itu hanya air belaka sekedar untuk menghibur anaknya yang merintih menahan kelaparan. Ia berpikir, hal ini tanggung jawab sebagai khalifah dan tak perlu terjadi seandainya ia tahu sebelumnya. Maka pada saat itu ia pergi meninggalkan tempat itu dan segera kembali memanggul bahan makanan (gandum) dan lain-lain untuk diberikan kepada keluarga itu agar segera dimasak untuk mereka makan.¹⁵ Maka dapat dikatakan puncak kejayaan negara Madinah terwujud pada masanya, sehingga menjadikan Umar sebagai salah seorang contoh tauladan dalam mewujudkan kemaslahatan manusia baik untuk dunia maupun untuk akhirat, sehingga masyarakat pada masa itu sejahterah.

Kebijakan ekonomi pada masa Umar Bin Khattab menggunakan dasar-dasar diantaranya adalah :¹⁶ Negara memberikan hak atas kekayaan umum, dan tidak ada pengeluaran kecuali dengan haknya dan negara menambahkan subsidi serta menutup hutang. Yang mana subsidi negara harus dibelanjakan/memperhatikan beberapa hal diantaranya pembagian hasil perang yang jumlahnya 1/5 dibebankan sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam al-Quran dalam surat al-Asyr (59) : 7)

¹⁵J.Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-1, h. 137

¹⁶Quthb, Ibrahim, *op. cit.*, h. 34.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً
 بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
 فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٩﴾

Artinya : Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Q.S al-Asyr (59) : 7).

Di dalam *fiqih siyasah maliyah* pun pengaturannya di orientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam *siyasah maliyah* ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintah atau penguasa. Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang-orang kaya dan orang miskin. Di dalam *siyasah maliyah* dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan-kebijakan yang harus diambil untuk mengorientasikan dua kelompok ini, agar kesejahteraan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.¹⁷

¹⁷.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu syariah*, (Bandung: Kencana, 2003), Cet. ke-1, h. 276.

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat sebagai kajian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PROBLEMATIKA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA KOTO TUO KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT FIQIH SIYASAH”**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apa dasar penetapan dan kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Koto Tuo?
2. Bagaimana proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Koto Tuo?
3. Bagaimana penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) menurut fiqih siyasah?

C. Bataasan masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah, adapun masalah yang akan diteliti adalah apa dasar penetapan dan kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) menurut fiqih siyasah ?

D. Tujuan Penelitian

Berpijak dari perumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar penetapan, kriteria, dan proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) .
2. Untuk mengetahui bagaimana penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) menurut Fiqih Siayasah?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangsi pikiran atau masukan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)
2. Sebagai bahan pemikiran dan petunjuk dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar dasar penetapan dan kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tepat sasaran .
3. Melengkapi persayratan untuk mendapatkan gelar serjana S1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

F. Metode Penelitian

1. Lokasi, Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang dilaksanakan di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Subjek penelitian adalah masyarakat miskin di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Sedangkan objek penelitian adalah Problematika Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

2. Populasi Dan Sampel

Jumlah penduduk di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar yaitu 2019 orang/jiwa (2008) dengan 500 Kepala Keluarga (KK), jumlah penduduk miskin yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) 379 orang maka dari jumlah tersebut dijadikan sebagai populasi. Dan 100 orang dari jumlah tersebut dijadikan sampel. Adapun teknik yang dipergunakan adalah *Purposive Sampling*.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari responden yang ada, Kepala Desa, dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Datar Sekunder

Yaitu data dan informasi yang diperoleh dari Kantor Desa dan bahan-bahan bacaan atau sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Angket

Yaitu berupa daftar pertanyaan yang di ajukan dan disebarakan kepada masyarakat miskin yang dijadikan responden dalam penelitian ini. Angket yang disebarakan ini telah disiapkan terlebih dahulu secara cermat.

b. Wawancara

Yaitu mengajukan pertanyaan langsung terhadap masyarakat miskin sebagai responden, Kepala Desa, pegawai Kantor Desa dan yang berkaitan dengan penelitian di Desa Koto Tuo XIII Koto Kampar.

c. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap proses penyaluran BLT di lapangan.

d. Dokumentasi

Dengan mengutip dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti daftar nama penerima BLT, surat-surat kabar seperti majalah dan Koran, dan tentunya yang sesuai dengan objek ini sehingga bisa dijadikan bahan acuan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1) Metode induktif.

Berfikir induktif berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

2) Metode Deduktif

Yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu, kita hendak menilai sesuatu kejadian khusus

3) Deskriptif

Yaitu dengan jalan menggambarkan secara tepat masalah yang sedang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian di analisa.

G. Sistematika Penulisan

Sebagai pola dasar bagi penulis demi terahnya dan untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini, penulis mengemukakan sistematika penulisan yang di bagi dalam lima bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisa data, dan sistematika penulisan.

- BAB II : GAMBARAN UMUM DESA KOTO TUO yang terdiri dari Geografis dan demografis, jumlah penduduk, mata pencarian, agama, dan pendidikan.
- BAB III : TINJAUAN TEORITIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) yang terdiri dari dasar penetapan, kriteria atau syarat penetapan penerima BLT, proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- BAB IV : PROBLEMATIKA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA KOTO TUO KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT FIQIH SIYASAH, yang terdiri dari dasar penetapan dan kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menurut Fiqih Siyasah?
- Bab V : Kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA KOTO TUO

A. Geografis dan Demografis

1. Geografis

Secara geografis Desa Koto Tuo merupakan satu kelurahan yang termasuk dalam Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Penduduk Desa Koto Tuo dapat dikatakan sebagai komunitas yang heterogen dari berbagai sisi. Dari segi mata pencarian penduduk Desa Koto Tuo ini ada yang berstatus sebagai petani, buruh tani, nelayan, pegawai, wiraswasta dan sebagainya. Dan ditambah penduduk yang mata pencariannya yang tidak tetap. Dan dari segi etnis Desa Koto Tuo terdiri, Batak, Aceh, Nias, Melayu, Minang, dan Jawa. Penduduknya ada yang pendatang dan penduduk tetap.

Adapun jarak Desa Koto Tuo dengan pusat pemerintahan 7 Km, Desa koto tuo berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kabupaten 50 Koto
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Koto Tuo Barat
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Binamang

Pada daerah ini 80 % merupakan tanah perbukitan dan selebihnya dataran yang ditumbuhi rumput dan sema belukar yang subur. Di sini juga terdapat sarana dan prasarana transportasi yang cukup lancar seperti,

travel, superben, kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Jalan aspal yang menjadi penunjang yang menghubungkan antara Desa Koto Tuo dengan desa-desa lainnya.

Luas daerah Desa Koto Tuo dan kelurahan adalah 16.000 Ha. Sedangkan jarak pusat pemerintahan 7 Km, jarak dari Ibu kota Kabupaten adalah 60 Km, dan jarak dari Ibu kota Provinsi 127 Km

Dengan demikian Desa Koto Tuo dan kelurahan merupakan daerah yang strategis dan mudah dijangkau terutama dengan jalur transportasi darat, sehingga memudahkan seluruh baik perdagangan maupun komersial lainnya. Hal ini terbukti dengan banyaknya pendatang dari Koto Tuo untuk mencari nafkah, baik dengan berdagang, bertani, pemotong karet dan lain sebagainya.

2. Demografi

Adapun penduduk Desa Koto Tuo berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2008/2009 berjumlah 2019 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1045 jiwa dan perempuan sebanyak 974 jiwa, yang terdiri atas 500 Kepala Keluarga (KK), mereka sudah dinyatakan sebagai penduduk yang resmi. Dari jumlah di atas penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Untuk itu lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

TABEL I
KALSIFIKASI PENDUDUK KOTO TUO MENURUT
JENIS KELAMIN

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki –laki	1045	51,75
2	Perempuan	974	48,25
	Jumlah	2.019	100

Sumber data : Kantor Desa Koto Tua Tahun 2008

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Koto Tuo berjenis laki-laki lebih banyak yaitu 1045 jiwa atau 51,75% , dan jenis kelamin perempuan yaitu 974 jiwa atau 48,25%.

Disamping jumlah penduduk Desa Koto Tuo jika didasarkan pada tingkat usianya adalah seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini :

TABEL II
KLASIFIKASI JUMLAH PENDUDUK DESA KOTO TUO
MENURUT KELOMPOK UMUR

No	Kelompok Umur	Jumlah Jiwa	Persentase
1	1 - 5 Tahun	94	4,65
2	6 - 10 Tahun	221	10,94
3	11 - 15 Tahun	227	11,24
4	16 - 20 Tahun	265	13,12
5	21 - 25 Tahun	275	13,62
6	26 – 30 Tahun	330	16,34
7	31 - 40 Tahun	194	9,60
8	41 - 45 Tahun	142	7,03
9	46 - 50 Tahun	55	2,72
10	51 - 60 Tahun	42	2,08
11	61 - 65 Tahun	60	2,97
12	66 - 70 Tahun	40	2,00
13	71 - 75 Tahun	28	1,40
14	76 - 80 Tahun	34	1,70
15	> 80 Tahun	12	0,59
	Jumlah	2.019 Jiwa	100%

Sumber Data : Kantor Desa Koto Tuo Tahun 2008

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa jumlah terbanyak dari golongan usia penduduk Desa Koto Tuo adalah antara 26-30 tahun yakni sebanyak 330 Orang atau 16,34 %, dan yang kedua antara 21-25 tahun yakni sebanyak 275 atau 13,62 %, dan yang ketiga 16-20 sebanyak 265 atau 13,12 %, 11-15 sebanyak 227 atau 11,42 %, 6-10 sebanyak 221 atau 10,94 %, 31-40 sebanyak 194 atau 9,60 %, 41-45 sebanyak 142 atau 7,03 % dan usia selanjutnya dapat dilihat pada tabel di atas.

Adapun dari jumlah penduduk di atas terdiri dari bermacam-macam etnis bangsa yaitu Melayu, Aceh, Batak, Nias, Minang, Jawa. Suku mayoritas di Desa Koto Tuo adalah suku Melayu yang berjumlah 1928 orang/jiwa atau 95,49 %, kemudian diikuti oleh etnis Minang 36 orang/jiwa atau 1,78 %, Jawa yakni 22 orang/jiwa atau 1,08 %, Batak, Aceh, menempati urutan ke keempat dan kelima. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL III
KLASIFIKASI PENDUDUK KOTO TUO
MENURUT ETNIS

NO	SUKU BANGSA	JUMLAH	PERSENTASE
1	Aceh	8	0,00
2	Batak	18	0,89
3	Nias	7	0,00
4	Melayu	1928	95,49
5	Minang	36	1,78
6	Jawa	22	1,08
	Jumlah	2.019	100%

Sumber Data: Kantor Desa Koto Tuo, Tahun 2008/2009

Penganut agama Islam merupakan penduduk mayoritas di Desa Koto Tuo yakni sebanyak 2.019 orang/jiwa. Tingginya penganut agama Islam di kelurahan ini merupakan hal yang wajar, karena agama Islam adalah

merupakan agama penduduk asli di Desa Koto Tuo kepercayaan ini sudah menjadi agama yang turun temurun. Sedangkan agama lain selain Islam merupakan agama yang datang belakangan seiring dengan makin berkembangnya di Desa koto Tuo, seperti adanya perkebunan Karet dan sawit lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL IV
JUMLAH PENDUDUK DESA KOTO TUO
MENURUT AGAMA YANG DI ANUT

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	2.013 Jiwa	100
3	Kristen	6	0,00
4	Budha	-	
5	Hindu	-	
	J UMLAH	2.019 Jiwa	100%

Sumber Data: Kantor Desa Koto Tuo Tahun 2008/2009

B. Pendidikan

Pendidikan merupakan tolak ukur maju atau tidaknya suatu masyarakat, Artinya semakin tinggi tingkat rata-rata pendidikan suatu penduduk akan semakin tinggi pula kemajuan yang terdapat di pemukiman itu. Kalau semakin rendah tingkat pendidikan maka akan semakin rendah pula tingkat kemajuannya. Sehingga jika suatu komunitas penduduk ingin maju dan berkembang secara baik maka pendidikan dan peningkatan mutu sumber daya manusianya harus diperbaiki, dibina dan dikembangkan secara sungguh-sungguh. Hal ini nampaknya mulai di sadari oleh pemerintah. Hal ini terbukti dengan digiatkannya program-program pendidikan mulai dari tingkat dasar

sampai tingkat tinggi. Hal ini dimaksudkan agar warga negara Indonesia menjadi manusia yang bertaqwa dan bersumber daya manusia yang tinggi. Itu semua tidak luput dari adanya kesadaran akan arti pentingnya sebuah pendidikan padasetiap warga Negara

Program Pemerintah yang terus memotivasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan sedikit banyak telah mendapat tanggapan positif dari sebagian besar masyarakat Desa Koto Tuo. Hal ini terbukti dari lahirnya kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan. Dengan adanya kesadaran ini, maka secara berangsurangsur pula anak-anak yang semulanya ikut orang tuanya mencari nafkah, dengan cara ikut bekerja dan mengerjakan pekerjaan, mulai berkurang dan berubah masuk sekolah. Setelah mereka menamatkan jenjang Sekolah Dasar, banyak diantaranya yang meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan ada yang sampai kejenjang Perguruan Tinggi. Hal ini merupakan sesuatu yang patut disyukuri. Betapa tidak, dengan adanya minat yang tinggi dari masyarakat Desa Koto Tuo untuk menyekolahkan anak-anaknya, ini menunjukkan bahwa program pemerintah dibidang pendidikan mulai mendapat tempat di hati masyarakat. Hal ini terbukti dengan rangka yang menunjukkan tingginya minat anak-anak Desa Koto Tuo yang sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL V
JUMLAH PENDUDUK DESA KOTO TUO
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum Sekolah	158	7,82
2	Tamat Sekolah Dasar (SD)	722	35,76
3	Tamat S L T P	734	36,35
4	Tamat S L T A	330	16,34
5	Perguruan Tinggi (PT)	75	3,71
Jumlah		2.019	100%

Sumber Data: Kantor Desa Koto Tuo Tahun 2008/2009

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa betapa besar Jumlah anak-anak di Desa Koto Tuo yang sedang menempuh pendidikan SD yakni 722 Orong atau 35,76 %, SLTP sebanyak 734orang atau sebesar 36,35 % dan SLTA 330 orang atau 16,34 %, perguruan tinggi sebanyak 75 orang/jiwa. Dan Jumlah itu merupakan angka yang cukup menggembirakan. Angka ini merupakan satu bukti bahwa betapa tinggi kesadaran dan kepedulian mereka terhadap pendidikan.

Tingginya minat anak-anak yang sedang menempuh pendidikan bukan sekedar terlihat pada angka-angka di atas, juga ditandai oleh adanya bangunan sarana dan prasarana pendidikan yang berdiri megah di Desa Koto Tuo sehingga ikut memicu tingginya minat belajar. Adapun sarana pendidikan yang terdapat di Desa Koto Tuo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL VI
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
DI DESA KOTO TUO

No	Jenis sarana	Jumlah	Persentase
1	TK Swasta	1	25
2	SD Negeri	1	25
3	SLTP	1	25
4	SMEA	1	25
Jumlah		4	100%

Sumber Data : Kantor Desa Koto Tuo tahun 2008/2009

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa di Desa Koto Tuo sarana dan prasarana pendidikan sangat memadai. Hal ini dapat terbukti bahwa dalam satu Desa/kelurahan yang luas wilayahnya 16.000 km² terdapat empat buah sarana pendidikan. Hal ini merupakan kemajuan yang menggembirakan.

C. Mata Pencaharian.

Desa Koto Tuo selain merupakan kelurahan yang berwilayah perbukitan dan rawa-rawa, juga dikenal sebagai daerah perkebunan karet. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika daerah ini banyak didatangi oleh pendatang dari luar daerah untuk mengais nafkah di sana. Keadaan seperti ini sudah menjadi pemandangan yang biasa. Para pendatang dari luar bekerja apapun yang dapat dikerjakan. Selain sebagian dari mereka ada yang menjadi buruh tani, sebagian lainnya yang menjadi pedagang. Hal senada juga terjadi pada penduduk asli daerah itu, yakni mereka mengerjakan bermacam-macam jenis pekerjaan sesuai dengan keahlian mereka masing masing.

Para pendatang yang dimaksud adalah mereka yang berasal dari Jawa, Aceh, Batak, Minang, Nias. Kedatangan mereka sebenarnya sudah lama.

Namun, dari keterangan yang akurat sebagian besar dari mereka datang sejak perkebunan karet di mulai di Desa Koto Tuo

Harus diakui bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan tingkat mata pencarian masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat yang tingkat pendidikannya tinggi akan cenderung berbeda dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah dan cara hidup. Bahkan lingkungan dan alam pun ikut berperan dalam menentukan perberdaan karakteristik mata pencaharian masyarakat setempat.

Penduduk Desa Koto Tuo mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda. Namun sebagian besar dari penduduk Desa Koto Tuo adalah sebagai Petani, yakni sebanyak 550 orang atau 43,13 %, kemudian pekerjaan tidak tetap 350 orang atau 27,45 %, Pedagang 120 orang atau 9,41 %, Nelayan 95 orang atau 7,45 %, sedangkan yang lain berjumlah di bawah dari pada 100 orang. Hal ini dapat dimaklumi karena sebagaimana disebutkan di muka bahwa Desa Koto Tuo di sebut juga kawasan perekebunan, karena di daerah ini banyak berdiri perkebunan-perkebunan karet dan dan sawit.

Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Koto Tuo dilihat pada tabel berikut :

TABEL VII
JUMLAH PENDUDUK DESA KOTO TUO
MENURUT MATA PENCAHARIAN

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani	550	43,13
2	Buru tani	85	6,66
4	Pegawai Negeri Sipil	50	3,92
5	Pedagang	120	9,41
6	Nelayan	95	7,45

7	Montir	5	0,39
9	TNI	2	0,15
10	Polri	10	0,78
11	Jasa angkutan	8	0,62
12	Lain-lain (pekerjaan tidak menetap)	350	27,45
	Jumlah	1.275	100

Sumber Data : Kantor Desa Koto 2008/2009

Dalam tahap ini secara umum dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk asli Desa Koto Tuo merupakan penduduk yang tingkat perekonomiannya berada pada level menengah ke bawah, dan tidak dapat dipungkiri banyak pula di antara penduduk yang tingkat perekonomiannya berada dibawah garis kemiskinan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan kalangan yang taraf ekonominya lebih tinggi.

Tingkat perekonomian yang rendah inilah yang selalu menjadikan warga setempat mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintahan, penghasilan keluarga yang kadang-kadang pas-pasan untuk satu minggu.

Dari uraian-uraian bab ini secara umum dapat disimpulkan bahwa dari sisi geografis dan demografis, di Desa Koto Tuo merupakan daerah yan mudah dijangkau. Di samping itu juga merupakan daerah yang banyak penduduknya yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai tani/perkebunan karet.

Selanjutnya di Desa Koto Tuo sudah berdiri lembaga pendidikan dan sebagian besar anak-anak di Desa Koto Tuo sedang melaksanakan pendidikan, baik pendidikan menengah dan perguruan tinggi.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS PENYALURAN

BANTUAN LANGSUNG TUNAI

A. Latar Belakang Bantuan Langsung Tunai

Pada Bulan Oktober 2005, pemerintah menaikkan harga dasar BBM. Kenaikan tersebut mengakibatkan harga kebutuhan pokok meningkat dan bagi masyarakat miskin mengakibatkan daya beli mereka semakin menurun karena akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan harga pasar.¹ Untuk itu diperlukan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Seiring dengan besarnya beban subsidi yang dianggap membebani keuangan negara, pemerintah perlu merevisi kembali kebijakan subsidi BBM sehingga subsidi tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat miskin. Salah satu bentuk kebijakan penghapusan subsidi BBM adalah Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) berupa Subsidi/Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Miskin (RTM). Untuk mendukung kelancaran program tersebut diperlukan ketersediaan data kemiskinan baik jumlah maupun karakteristiknya yang bersifat makro agar sasaran program lebih terarah serta data kemiskinan yang bersifat mikro yang menunjukkan informasi tentang siapa dan dimana penduduk miskin berada. Data tersebut berguna bagi distribusi bantuan langsung kepada penduduk miskin agar dapat dilakukan secara efektif dan lebih tepat sasaran.

¹ http://www.Bpk.Go.Id/Doc/Hapsem/2006ii/APBN/116B_Prog_BLT_BPS_Bandung
(Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK))

Penyediaan data kemiskinan mikro walaupun telah dilakukan di beberapa provinsi, tetapi cakupan, waktu pelaksanaan dan kriteria yang digunakan antar daerah hasilnya masih bervariasi. Atas dasar hal tersebut, pemerintah merasa perlu untuk melakukan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2008 (PSE-08) di seluruh wilayah Indonesia melalui pendekatan yang terintegrasi dengan tujuan memperoleh informasi tentang siapa dan dimana penduduk/keluarga miskin.

Ketimpangan pendistribusian pendapatan lebih terasa lagi ketika negara sedang dilanda berbagai krisis, terutama sekali krisis moneter atau ekonomi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan ini telah pula menurunkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara drastis. Terutama sekali rakyat yang berada dibawah garis kemiskinan.

Masalah kemiskinan muncul kerana adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Akibatnya ia harus mengakui keunggulan kelompok masyarakat lainnya dalam persaingan mencari nafkah dan kepemilikan aset yang produktif sehingga semakin lama semakin tertinggal. Dalam prosesnya gejala tersebut memunculkan masalah baru yakni terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan.²

Misi perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat kecil dan untuk lebih menjamin keberadaan hak-hak mereka terus diagung-agungkan. Berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kebutuhan masyarakat miskin

² Hadi Prayitno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Ghalia Indonesi, 1996), Cet. ke-1, h. 99.

harus selalu diprioritaskan. Oleh karena itulah dalam upaya mengurangi beban mereka yang termasuk kedalam kategori masyarakat miskin, maka diselenggarakan program bantuan pemerintah untuk rakyat yang terkena imbas akibat perubahan sosial politik Negara.

Program bantuan pemerintah itu meliputi, Jaringan Pengamnan Sosial (JPS) atau program dana Jaminan Sosial pada tahun 1998-2002 dan program kompensasi pengurangan subsidi BBM berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2008. Program bantuan tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan masyarakatnya.

B. Bentuk Bantuan

Secara kongkrit upaya peningkatan kesejahteraan rakyat berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan perlu dilakukan dalam program pembangunan lintas sektoral. Diantaranya adalah melalui berbagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pembangunan ketenaga kerjaan, pemberdayaan usaha mikro, menengah, koperasi, pembangunan pertanian, pangan dan pengairan, pembangunan sarana dan prasarana pedesaan serta berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup.

Program-program tersebut harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dimana penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya strategis dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan.

Oleh karena itu mulai tahun 2005-2008 pemerintah mengadakan suatu program bantuan rakyat. Program itu di antaranya, Dana Kompensasi BBM, program Kompensasi pengurangan subsidi BBM berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berupa bentuk uang yang disalurkan langsung kepada masyarakat miskin.

C. Dasar Penetapan BLT

Adapun dasar penetapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan: Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.³

Untuk kelancaran pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan ini menginstruksikan Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, *loc. cit.*

6. Menteri Sosial;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Komunikasi dan Informatika;
9. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
10. Jaksa Agung Republik Indonesia;
11. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Kepala Badan Pusat Statistik;
14. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
15. Para Gubernur;
16. Para Bupati/Walikota.

D. Tujuan dan Sasaran Program BLT

1. Tujuan Program BLT

Pemberian BLT kepada RTM/RTS ditujukan untuk memberikan kompensasi terhadap pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) guna :

- 1) Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 2) Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
- 3) Meningkatkan tanggungjawab sosial bersama.⁴

⁴ <http://www.Bpk.Go.Id/Doc/Hapsem/2006ii/APBN/116B>, *loc.*, *cit.* _ _

2. Sasaran Program BLT

BLT diberikan kepada keluarga RTM/RTS berdasarkan hasil pendataan BPS dan telah menerima KKB yang ditandatangani oleh Menteri Sosial.⁵

E. Kriteria Penerima BLT

Keluarga fakir miskin di Indonesia sangat banyak, dari yang benar-benar miskin sampai kepada yang mengaku miskin yang ingin mendapatkan bantuan. Karena banyaknya masyarakat yang miskin, maka perlu pengklasifikasiannya agar bantuan tersebut benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Depsos mendefenisikan fakir miskin itu adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan/orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetap tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.⁶ Pakir miskin ini mempunyai ciri-ciri yaitu keterbatasan atau kurangnya kemampuan ekonomi, keterampilan, pendidikan, rendahnya tingkat kesehatan dan keadaan gizi keluarga, terbatasnya lapangan dan kesempatan kerja serta keterbatasan akses dalam kegiatan ekonomi⁷.

Menurut Emil Salim, ciri masyarakat miskin adalah pada umumnya mereka tidak mempunyai faktor produksi, mereka tidak memiliki

⁵ *Ibid.*

⁶ Keputusan Menteri Sosial RI, No. 23/Huk/1996 Tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial, (Jakarta : DEPSOS RI, 1996),Cet. ke-3, h.130

⁷ *Ibid.*

kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, tingkat pendidikan rendah karena waktu mereka tersita untuk mencari nafkah dan mendapatkan pendapatan penghasilan, kebanyakan mereka tinggal di pedesaan dan mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak didukung oleh keterampilan yang memadai.⁸

Pengertian miskin yang dikemukakan oleh Imam Malik, “orang yang untuk keperluan hidupnya tidak segan-segan meminta bantuan orang lain”. Pengertian ini sama dengan pengertian miskin menurut Abu Hanifah, dimana miskin lebih banyak/sangat membutuhkan daripada fakir.⁹

Berdasarkan gambaran di atas, maka pemerintah menetapkan kriteria penerima BLT untuk Rumah Tangga Sasaran (Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*)) 14 kriteria, adalah sebagai berikut :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi untuk masing-masing anggota keluarga.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu berkualitas rendah.
3. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah.
4. Fasilitas jamban tidak ada, atau ada tetapi dimiliki secara bersama-sama dengan keluarga lain.

⁸ Hadi Prayitno, *op. cit.*, h. 102

⁹ A. Djazuli, *op. cit.*, h. 347-348

5. Sumber air untuk minum/memasak berasal dari sumur/mata air tak terlindung, air sungai, danau, atau air hujan.
6. Sumber penerangan di rumah bukan listrik.
7. Bahan bakar yang digunakan memasak berasal dari kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
8. Dalam seminggu tidak pernah mengonsumsi daging, susu, atau hanya sekali dalam seminggu.
9. Dalam setahun paling tidak hanya mampu membeli pakaian baru satu stel.
10. Makan dalam sehari hanya satu kali atau dua kali.
11. Tidak mampu membayar anggota keluarga berobat ke puskesmas atau poliklinik
12. Pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan setengah hektar, buruh tani, kuli bangunan, tukang batu, tukang becak, pemulung, atau pekerja informal lainnya dengan pendapatan maksimal Rp 600 ribu per bulan.
13. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga bersangkutan tidak lebih dari SD.
14. Tidak memiliki harta senilai Rp 500 ribu seperti tabungan, perhiasan emas, TV berwarna, ternak, sepeda motor (kredit/non-kredit), kapal motor, tanah, atau barang modal lainnya.¹⁰

¹⁰ Badan Pusat Statistik, *loc. cit.*

Selain 14 poin di atas, anggota rumah tangga yang bekerja sebagai PNS, anggota TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD, pensiunan PNS/TNI/ Polri, maka keluarga tersebut tidak berhak mendapat BLT.

Namun kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat mengandung pro dan kontra terhadap realitanya di lapangan, kriteria yang telah ditetapkan pemerintah tidak cocok, seperti pendataan penduduk miskin yang menerima BLT, penentuan kriteria miskin, sehingga pemerintahan Desa Koto Tuo mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang BLT yang telah diberikan wewenang oleh pemerintahan Kabupaten.¹¹

F. Proses Penyaluran BLT

1. Tahap Penyaluran

Organisasi dalam tahap penyaluran meliputi :¹²

a. Pendistribusian KKB

1. PT.Pos Indonesia bertugas membuat/mencetak KKB sesuai data yang diberikan oleh BPS dan mengirimkan KKB yang telah dicetak langsung ke alamat BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
2. BPS Kabupaten/Kota membentuk tim pendistribusian KKB di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan, masing-masing difasilitasi oleh Bupati/Walikota dan Camat. Tim di tingkat kecamatan terdiri dari petugas BPS, aparat kecamatan, aparat

¹¹ Syaifuddin, (Kepala Desa Koto Tuo), *wawancara*, di Desa Koto Tua, 18 Oktober 2009

¹² <http://www.Bpk.Go.Id/Doc/Hapsem/2006ii/APBN>, *loc. cit.*

desa/kelurahan dibawah pengawasan BPS Kabupaten/Kota dan BPS Provinsi.

b. Penyaluran dana BLT

PT Pos Indonesia melalui Kantor Pos Bayar bertugas untuk ;¹³

- a) Melakukan pembayaran dana BLT-RTS sesuai dengan daftar penerima BLT dan KKB;
- b) Melakukan supervisi, monitoring dan pengawasan khusus yang berkaitan dengan penyaluran BLT-RTS

¹³ *Ibid.*

BAB IV
PROBLEMATIKA PENYALURAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DI DESA KOTO TUO KECAMATAN XIII KOTO
KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT FIQIH SIYASAH

**A. Dasar Penetapan dan Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai di
Desa Koto Tuo**

Sejak timbulnya krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter Pada pertengahan tahun 1997, pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi meningkat pesat yang berakibat taraf hidup rakyat Indonesia merosot, dan jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran meningkat.¹

Pada bulan Oktober 2005, Pemerintah menaikkan harga dasar BBM. Kenaikan tersebut mengakibatkan harga kebutuhan pokok meningkat dan bagi masyarakat miskin mengakibatkan daya beli mereka semakin menurun karena akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan harga pasar.² Untuk itu diperlukan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Seiring dengan besarnya beban subsidi yang dianggap membebani keuangan negara, pemerintah perlu merevisi kembali kebijakan subsidi BBM sehingga subsidi tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat miskin dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, Program ini telah mengundang pro dan kontra. Berbagai sisi dari program ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan, baik masalah persiapannya, seperti proses pendataan

¹Soedano Soekamto, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), Cet. ke-2, h.75.

² <http://www.bpk.go.id/doc/hapsem/2006ii/APBN>, *loc. cit.*

penduduk miskin, penetapan kriteria miskin tidak akurat dengan data di lapangan dan juga dengan adanya BLT justru menyebabkan banyak warga masyarakat memilih menjadi anggota keluarga miskin serta banyak terdapat orang-orang yang tidak merasa malu mengaku miskin hanya karena menginginkan BLT, harga diri tidak lagi jadi pertimbangan utama demi perebutan status miskin, untuk itu pemerintah Desa Koto Tuo mengambil kebijakan-kebijakan untuk menjaga stabilitas dan keamanan, namun tidak terlepas dari aturan dan perundangan yang telah ditetapkan.

1. Dasar Penetapan

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tanggal 14 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran (yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia, secara umum ini menjadi dasar penetapan hukum penerima Bantuan langsung tunai (BLT).

Masyarakat miskin di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, khususnya di Desa Koto Tuo jumlahnya banyak dan semua membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk kesejahteraan kelangsungan hidup mereka. Akan tetapi tidaklah kesemua itu mendapat bantuan dari pemerintah, tentu ada yang lebih berhak. Dan ditambah lagi dengan adanya program pemerintah subsidi Bantuan Langsung Tunai (BLT) menyebabkan banyaknya masyarakat yang mengaku miskin hanya ingin mendapatkan BLT. Untuk itu tentu memerlukan pemilihan atau penetapan

kriteria kembali. Karena kriteria 14 yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak cocok terhadap realitanya di lapangan, seperti penentuan kriteria miskin, sehingga pemerintahan Desa Koto Tuo mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang penerima BLT yang telah diberikan wewenang oleh pemerintahan Kabupaten

2. Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai

Penyimpangan terhadap kriteria kemiskinan yang ditetapkan pemerintah, pendataan rumah tangga miskin untuk program BLT yang dikenal dengan pendataan sosial ekonomi penduduk yang dilaksanakan oleh pencacah/pendata kurang tepat sasaran yaitu masih ada masyarakat yang mendapatkan BLT tidak semua dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Penetapan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 14 kriteria tidak cocok dengan keadaan yang ada di lapangan, maka pemerintahan Kabupaten memberikan wewenang kepada Pemerintahan Desa untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang diambilnya dalam Musyawara Desa untuk menentukan kriteria penerima BLT.³

Oleh Karena banyaknya masyarakat miskin di Desa Koto Tuo, maka Kepala Dusun sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat perlu mengadakan musyawarah RW/RT kembali dalam penetapan kriteria penerima Bantuan Langsung

³ Syaifuddin (Kepala Desa), *wawancara*, di Desa Koto Tuo, 21 Oktober 2009

Tunai. Agar masyarakat benar-benar miskin mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Adapun hasil musyawara RW/RT syarat atau kriteria yang digunakan adalah :

1. Kadus I syarat yang digunakan :
 - a. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau pekerjaan lepas
 - b. Masyarakat yang mempunyai pekerjaan tetap, tetapi penghasilannya tidak tetap.
 - c. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan karena kondisi fisiknya, seperti udzur, cacat, sakit⁴
2. Kadus II syarat yang digunakan adalah :
 - a. Masyarakat yang pekerjaannya buruh
 - b. Masyarakat yang kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi dalam sehari karena penghasilannya tidak cukup.⁵
3. Kadus III Syarat yang di gunkan adalah :
 - a. Masyarakat yang pendapatannya kurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
 - b. Masyarakat yang memiliki anggota keluarga yang banyak
 - c. Para janda yang pendapatan tidak tetap⁶

⁴ Zen Habibi (Kadus I), *wawancara*, di Desa Koto Tuo, 21 Oktober 2009

⁵ H. Chandri (Kadus II), *wawancara*, di Desa Koto Tuo , 21 Oktober 2009

⁶ Rudi Rahman (Kadus III), *wawancara*, di Desa Koto Tuo, 22 Oktober 2009

4. Kadus IV syarat yang digunakan adalah :

- a. Golongan 1/A dalam penerima beras raskin
- b. Janda tua yang lanjut usia
- c. Pendapatan Rp.500.000 perbulan.
- d. Mereka yang pada lahirnya dilihat tidak mampu dan berhak mendapatkan bantuan.⁷

Dari kriteria atau syarat yang dikemukakan oleh Kepala Dusun hasil dari musyawarah RT/RW tersebut di ajukan kepada kepala desa dalam agenda musyawarah desa. Maka dalam musyawarah desa diambil kesimpulan bahwa masyarakat miskin di Desa Koto Tuo yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah adalah :

- 1. Miskin A. Adalah Sangat Miskin, yaitu masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau pekerjaan lepas atau Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan karena kondisi fisiknya, seperti udzur, cacat, sakit.
- 2. Miskin B, yaitu mendekati/hampir Miskin, Masyarakat yang mempunyai pekerjaan tetap, tetapi penghasilannya tidak tetap.⁸

Dari hasil musyawara Desa Koto Tuo tersebut di atas dapat dilihat pada umumnya yang menerima Bantun Lasung Tunai di Desa Koto Tuo adalah orang-orang yang pekerjaan sehari-hari adalah Nelayan, Pedagang, Petani, Buruh Tani dan orang yang tidak mempunyai pekerjaan karena sakit, cacat dan udzur.

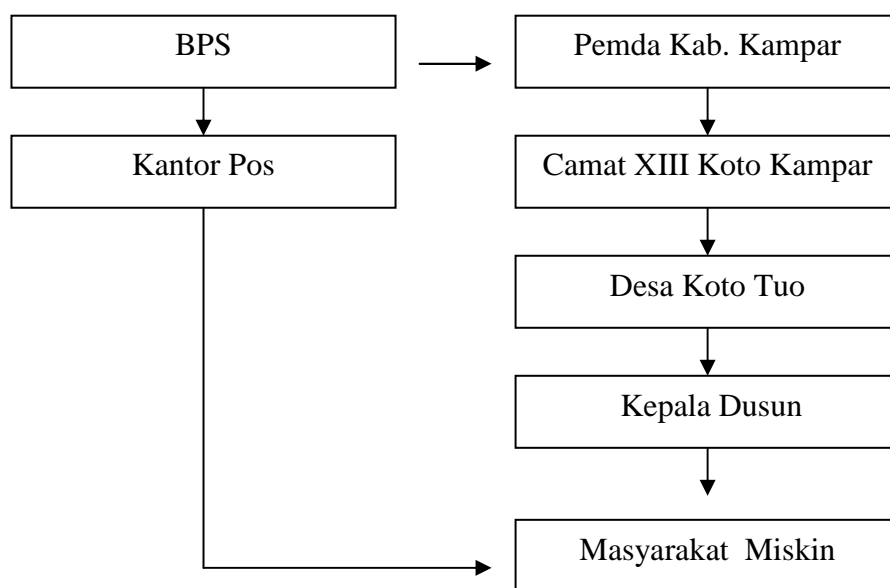
⁷ M. Shodikin, (Kadus IV), *wawancara*, di Desa Koto Tuo, 22 Oktober 2009

⁸ Syaifuddin (Kepala Desa Koto Tuo), *wawancara*, di Desa Koto Tuo, 20 Oktober 2009

B. Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

Dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), diperlukan suatu struktur yang tepat. Kegiatan perlu dirancang sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan yang baik dan memuaskan. Karena kegiatan ini menyangkut kemaslahatan masyarakat miskin yang membutuhkan. Dan bantuan ini harus betul-betul tepat sasaran demi kesejahteraan mereka.

Pelaksanaan proses penyaluran bantuan langsung tunai di Desa Koto Tuo membutuhkan suatu struktur yang tepat. Adapun bagan proses-proses penyaluran BL T :



Sumber : Kantor Desa Koto Tuo tahun 2008

Dari struktur atau bagan di atas dapat dilihat bahwa BPS dan kantor POS yang mempunyai peran utama dalam masalah BLT ini akan mengadakan proses penyaluran BLT, BPS kabupaten membentuk tim penyaluran KKB di tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Masing-masing di fasilitasi oleh Bupati,

Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun. Kantor Pos Bayar tersebut melakukan penarikan dana dari BRI Pusat dan menyalurkan dana tersebut kepada rumah tangga miskin sesuai dengan data yang ada Kantor Pos Bayar dan penyaluran dana oleh Kantor Pos bayar dilakukan setelah Kantor Pos bayar melakukan verifikasi mengenai kebenaran dan keabsahaan data yang diterima.

Namun dalam hal ini yang mempunyai peran langsung terhadap proses penyaluran BLT adalah BPS dan Kantor Pos. Masyarakat miskin yang terdaftar dan mempunyai KKB mengambil langsung ke Kantor Pos di Kecamatan .

Jadi dalam proses penyaluran Bantuan langsung Tunai Kepala Desa Koto Tuo tidak terlibat langsung, melainkan hanya sebagai yang mengetahui masyarakat yang miskin yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan memfasilitasi tim BPS Kabupaten dalam pendataan masyarakat miskin.

Masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah khususnya harus terdaftar pada BPS dan mempunyai Kartu Kompensasi BBM (KKB). Dalam hal ini yang mendaftarkan masyarakat tersebut adalah hasil pendataan BPS terhadap masyarakat miskin bersama RT/RW sebagai pemimpin terkecil di dalam lingkungan masyarakat.

Masyarakat yang mendapatkan bantuan BLT di Desa Koto Tuo tidaklah semua, melainkan bagi mereka benar-benar miskin dan membutuhkan. Karena kriteria yang ditetapkan pemerintah tidak cocok di lapangan, maka pemerintahan desa setempat mengambil suatu kebijakan dalam penetapan kriteria penerima BLT dengan mengadakan penyeleksian, yang terdaftar/menerima KKB tetap menerima dalam artian ada yang menerima

penuh dan ada yang menerima separuh dikarenakan diberikan kepada masyarakat miskin tidak terdaftar yang betul-betul membutuhkan.

Penyeleksian dapat menggunakan beberapa kriteria atau syarat, seperti yang di kemukan oleh Zen Habibi dan Rudi sebagai Kepala Dusun.

Menurut Zen Habibi kriteria atau syarat untuk medapatkan BLT adalah:

- a. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau pekerjaan lepas
- b. Masyarakat yang mempunyai pekerjaan tetap, tetapi penghasilannya tidak tetap.
- c. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan karena kondisi fisiknya, seperti udzur, cacat, sakit⁹

Sedangkan menurut Rudi kriteria atau syarat yang menerima BLT adalah:

- a. Masyarakat yang pendapatannya kurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. Masyarakat yang memiliki anggota keluarga yang banyak
- c. Para janda yang pendapatan tidak tetap¹⁰

Dari pendapat Kepala Dusun tersebut diatas bahwa masyarakat yang mendapatkan bantuan BLT setelah disepakati dalam musyawara Desa adalah :

⁹ Zen Habibi (Kadus I), *wawancara*, di Desa Koto Tua, 21 Oktober 2009

¹⁰ Rudi Rahman (Kadus III), *wawancara*, di Desa Koto Tuo , 22 Oktober 2009

- a. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau pekerjaan lepas atau Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan karena kondisi fisiknya, seperti udzur, cacat, sakit
- b. Masyarakat yang mendekati/hampir Miskin, Masyarakat yang mempunyai pekerjaan tetap, tetapi penghasilannya tidak
- c. tetap, dan memiliki anggota keluarga yang banyak.

Bantuan pemerintah (BLT) di Desa Koto Tuo hendaknya disalurkan kepada masyarakat miskin yang betul-betul membutuhkan dan tepat sasaran, sesuai dengan penetapan dan kriteria yang berlaku dalam penyaluran penyaluran. Untuk di Desa Koto Tuo mengenai tanggapan penyaluran penerima bantuan BLT pada masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL I
TANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG
PENYALURAN BLT

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sesui	25	25
2	Tidak sesuai	75	75
	Jumlah	100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penyaluran BLT di Desa Koto Tuo menurut masyarakat yang sesuai dengan kriteria sebanyak 25 orang atau 25 %, dan tidak sesuai dengan kriteria sebanyak 75 orang atau 32%.

Berdasarkan perbandingan alternatif jawaban tersebut dapat ditegaskan bahwa penyaluran bantuan BLT di Desa Koto Tuo tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh BPS, Sebagaimana dikatakan Nurbit, Abdul Manaf, dan Rajab, “dalam proses penyaluran tidak sesuai dengan kriteria yang telah

ditetapkan pemerintah, pemerintah desa mengambil kebijakan tentang kriteria penerima BLT, sehingga besar bantuan yang diterima bervariasi ada yang penuh dan ada separoh.¹¹

Untuk lebih jelas mengenai keadaan perekonomian masyarakat Desa Koto Tuo yang menerima Bantuan Langsung Tunai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABLE II
KEADAAN PEKERJAAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DI DESA KOTO TUO

no	Alternative jawaban	Frekwensi	Persentase
1	Petani	42	42
2	Buruh	15	15
3	Pedagang	3	3
4	Nelayan	18	18
5	Ibu rumah tangga (janda)	10	10
6	Pekerjaan Tidak tetap	12	12
	Jumlah	100	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata penerima subsidi Bantuan Langsung Tunai di Desa Koto Tuo bermata pencarian Petani adalah sebanyak 42 orang atau 42 % disusul oleh Nelayan 18 orang atau 18 %, Buruh 15 orang atau 15%, pekerjaan Tidak tetap 12 orang atau 10% dan Ibu Rumah Tangga 10 orang atau 10%.

Berdasarkan perbandingan alternatif jawaban pekerjaan masyarakat penerima subsidi Bantuan Langsung Tunai di Desa Koto Tuo adalah Petani. Hal ini kebanyakan mereka itu bekerja sebagai pemotong karet, kebun

¹¹ Nuribit, Abd Manaf, dan Rajab (Penerima Bantuan Langsung Tunai), wawancara, di Desa Koto Tuo, 22 November 2009

palauija. Sebagaimana Tibani mengatakan “kami bekerja sebagai pemotong karet, yang kadang-kadang kalau hari baik dan tidak hujan harga karet standar kami dapat uang, kadang tidak dan kalau pun dapat kadang kurang lebih Rp. 250.000,- satu minggu.¹²

Melihat keadaan pekerjaan masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Koto Tuo bervariasi, sudah tentu tingkat penghasilan atau pendapatannyapun berbeda sesuai dengan kemampuannya. Untuk lebih jelas mengenai pendapatan atau penghasilan masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Koto Tuo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL III
JUMLAH PENDAPATAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DI DESA KOTO TUO

No	Alternatif Jawaban	Frekwensi	Persentase
1	Rp. 150.000- 200.000	15	15
2	Rp. 210.000- 250.000	18	18
3	Rp. 260.000- 300.000	22	22
4	Rp. 310.000- 500.000	45	45
	Jumlah	100	100

Dari tabel di atas dapat dilihat pendapatan penerima subsidi Bantuan Langsung Tunai di Desa Koto Tuo adalah Rp. 350.000-500.000,- sebanyak 45 orang atau 45%, Rp. 260.000-300.000,- sebanyak 22 atau 22%, Rp. 150.000-200.000,- sebanyak 15 orang atau 15% dan 210.000-250.000,- sebanyak 18 orang atau 18%.

¹² Tibani (Penerima Bantuan Langsung Tunai), wawancara, di Desa Koto Tuo, 22 November 2009

Berdasarkan perbandingan alternatif jawaban tingkat pendapatan masyarakat penerima subsidi Bantuan Langsung Tunai di Desa Koto Tuo adalah mereka-mereka rata-rata yang memperoleh pendapatan Rp. 350.000,-500.000,- satu minggu.

Adapun jumlah anggota keluarga yang ditanggung oleh seorang penanggung jawab keluarga pada masyarakat penerima subsidi Bantuan Langsung Tunai di Desa Koto Tuo dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV
JUMLAH ANGGOTA KELUARGA YANG DI TANGGUNG
MASYARAKAT PENERIMA BLT DI DESA KOTO TUO

NO	Jumlah Keluarga	Frekwensi	Persentase
1	2 orang	15	15
2	3 orang	23	23
3	4 orang	34	34
4	5 orang	18	18
5	6 orang	10	12
	Jumlah	100	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah tanggungan anggota keluarga masyarakat penerima subsidi Bantuan Langsung Tunai Per-KK adalah yang 4 orang sebanyak 34 KK atau 34%, 3 orang sebanyak 23 KK atau 23 %, 5 orang sebanyak 18 KK atau 18%, 2 orang sebanyak 15 KK atau 15 %, 6 orang sebanyak 12 KK atau 12%.

Berdasarkan alternatif jawaban tersebut di tegaskan bahwa jumlah tanggung jawab dalam satu keluarga masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Koto Tuo adalah sebagian besar beranggota 4 orang keluarga.

Bantuan pemerintah BLT di Desa Koto Tuo di salurkan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan di sambut oleh masyarakat dengan penuh kegembiraan dan ada juga dengan biasa-biasa saja. Untuk di Desa Koto Tuo tanggapan mengenai BLT oleh masyarakat dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

TABEL V
TANGGAPAN MASYARAKAT PENERIMA BLT
DI DESA KOTO TUO

No	Alternativ Jawaban	Frekwensi	Persentase
1	Baik sekali	57	57
2	Baik	43	43
	Jumlah	100	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tanggapan Bantuan Langsung Tunai di Desa Koto Tuo menurut masyarakat baik sekali sebanyak 57 orang atau 57%, baik adalah 43 orang atau 43%.

Berdasarkan perbandingan alternatif jawaban tersebut dapat ditegaskan bahwa tanggapan penerima BLT di Desa Koto Tuo adalah baik sekali, hal ini di katakan Munir. D. dan Husain “dengan adanya BLT dapat membantu biaya hidup sehari-hari paling tidak untuk biaya satu minggu.”¹³

¹³ Munir. D. dan Husaian (Penerima Bantuan Lasung Tunai), *wawancara*, di Desa Koto Tuo, 24 November 2009

Dalam penerima penyaluran Bantuan Langsaung Tunai di Desa Koto Tuo dapat dilihat pada besar bantuan yang bervariasi selama setahun, masyarakat yang bulan dahulunya miskin dan ketika datang batuan tahap berikutnya ia tidak tergolong miskin dalam artian tingkat ekonomi masyarakat dalam setiap bulannya ada yang meningkat dan menurut (*supply demand*).¹⁴

Akan tetapi kenyataan dalam penyalurannya di lapangan tidak sesuai dengan data masyarakat miskin yang penerima BLT yang telah di tetapkan Badan Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Kabupaten Kampar. Di mana masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) berjumlah 281 KK dari data BPS dan di tambah 98 KK dari kebijaksanaan pemerintahan Desa Koto Tuo dengan total 397 orang. Sehingga di antara mereka ada yang menerima penuh dan ada yang separoh.¹⁵

Untuk yang lebih jelasnya dapat di ketahui jawaban penerima yang tertuang dalam tabel berikut ini :

TABEL VI
JUMLAH BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG DITERIMA
MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2008

No	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Rp. 300.000,-	68	68
2	Rp. 150.000,-	22	22
3	Rp. 100.000,-	10	10
	Jumlah	100	100

¹⁴ Syaifuddin (Kepala Desa), *wawaancara*, di Desa Koto Tuo, 27 Oktober 2009

¹⁵ *Ibid.*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa besarnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterima masyarakat di Desa Koto Tuo selama tahun 2008 bervariasi diantaranya adalah Rp.300.000,- sebanyak 68 KK atau 69 %, Rp. 150.000,- sebanyak 22 KK atau 22 %, sedangkan Rp. 100.000,- sebanyak 10 KK atau 10 %.

Berdasarkan alternatif jawaban tersebut dapat ditegaskan besarnya bantuan langsung tunai yang diterima oleh masyarakat miskin di Desa Koto Tuo tahun 2008 adalah :

- a. Rp. 300.000,-
- b. Rp. 150.000,-
- c. Rp. 100.000,-

Hal ini didasarkan pada banyaknya masyarakat miskin yang menerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Koto Tuo. Sedangkan besar bantuan tetap, sehingga diantara masyarakat yang terdaftar menerima bantuan BLT tersebut harus merelakan membagi bantuannya ke masyarakat miskin hasil dari kebijakan pemerintahan desa yang tidak terdaftar BPS sebagai penerima BLT. Seperti yang dikatakan oleh Roni “kami merelakan membagi bantuan langsung tunai tersebut, di karenakan pada tahap pertama kami terdaftar miskin, menurut kebijakan pemerintah Desa Koto Tuo untuk tahap kedua kami dikatakan : ekonomi kami telah meningkat”.¹⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat penerima BLT di Desa Koto Tuo mempunyai jiwa solidaritas tinggi terhadap sesamanya.

¹⁶ Roni (Penerima Bantuan Langsung Tunai), wawancara, di Desa Koto Tuo, 24 November 2009

Hal ini disebabkan oleh banyak masyarakat miskin di Desa Koto Tuo. Sedangkan besar Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tetap. Sehingga dengan demikian masyarakat yang terdaftar sebagai penerima tidak lagi penuh menerimanya. Diantaranya ada yang mendapatkan Rp. 300.000,-, Rp. 150.000,-, Rp. 100.000,-.

Bervariasianya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterima masyarakat miskin di Desa Koto Tuo menurut Kepala Desa bahwa masyarakat yang menerima bantuan BLT itu banyak dan terus bertambah. Sementara besar bantuan tetap dan tidak ada penambahan, masyarakat yang telah terdaftar diantara mereka tingkat ekonominya meningkat, maka dia tidak mendapatkan penuh dari dana BLT karena di bagikan kepada masyarakat miskin yang tingkat perekonomiannya menurun atau yang tidak terdaftar sepantasnya menerima dana BLT.¹⁷

Dalam hal keberadaan bantuan langsung tunai yang diterima masyarakat di Desa Koto Tuo selama tahun 2008 mendapat tanggapan yang berbeda dari masyarakat. Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa bantuan itu cukup, kurang dan jauh sekali kurangnya dalam memenuhi kebutuhana untuk sebulan. Untuk lebih jelas mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹⁷ Syaifuddin (Kepala Desa Koto Tuo), *wawancara*, di Desa Koto Tuo, 28 Oktober 2009

TABEL VII
TANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG BESARNYA
BLT UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP SEBULAN

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Cukup	10	10
2	Kurang cukup	74	74
3	Tidak cukup	16	16
	Jumlah	100	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat yang merasa cukup atas bantuan tersebut dalam memenuhi kebutuhannya selama sebulan adalah 10 orang atau 10%, sedangkan yang kurang cukup adalah 74 orang atau 74% dan yang merasa tidak cukup adalah 16 orang atau 16%.

Berdasarkan alternatif jawaban tersebut dapat ditegaskan bahwa masyarakat penerima bantuan langsung tunai di Desa Koto Tuo merasa bantuan tersebut kurang cukup. Hal ini sesuai dengan ungkapan Rosmina dan Kadir bahwa “bantuan dana BLT tiga bulan sekali menerima sebesar Rp. 300.000,- jauh sekali kurangnya dalam membantu tingkat konsumsi kami sekeluarga.¹⁸ dan begitu juga dikatakan oleh Badrun dan Adaina “uang sebanyak Rp. 300.000,- itu bagi kami yang menanggung 4 orang keluarga sangat kurang sekali. Karena setiap minggu kami membutuhkan uang lebih kurang Rp. 250.000,- untuk keperluan sehari-hari.¹⁹

¹⁸ Kadir dan Rosmina (Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)), wawancara, di Desa Koto Tuo, 25 November 2009

¹⁹ Badrun dan Adaina (Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)), wawancara, di Desa Koto Tuo, November 2009

Meskipun bantuan langsung tunai (BLT) tidak yang telah di kururkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, namun sebagian masyarakat penerima merasa senang dan bermanfaat atas bantuan tersebut dan sebagian masyarakat merasa tidak puas. Untuk lebih jelasnya mengenai pendapat masyarakat terhadap penerima bantuan langsung tunai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL VIII
PENDAPAT MASYARAKAT MANFAAT
BANTUAN LANSUNG TUNAI

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat bermanfaat	85	85
2	Bermanfaat	15	15
	Jumlah	100	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat penerima bantuan langsung tunai di Desa Koto Tuo yang menyatakan sangat bermanfaat sebanyak 85 orang atau 85% dan yang menyatakan cukup bermanfaat sebanyak 15 orang atau 15% .

Berdasarkan perbandingan jawaban tersebut ditegaskan bahwa pendapat masyarakat tentang manfaat bantuan langsung tunai, hal ini dapat diketahui dari pernyataan penerima bantuan langsung tunai sebagai mana alasan yang jawaban tentang mamnfaat BLT yang salah satunya menyatakan bahwa mereka merasa terbantu atas program BLT tersebut karena kami dapat menambah pembelian sambako dan paling tidak belanja anak-anak.

Di samping itu BLT yang diterima oleh masyarakat hendaknya berkelanjutan, karena dengan demikian kebutuhan masyarakat akan sembako sedikit banyak akan terbantu. Sehingga jika terjadi pengurangan tidaklah terlampau banyak untuk penambahnya.

C. Tinjauan Fiqih Siyasah

Program pemerintah yang dikenal dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rakyat sangat dianjurkan sekali karena merupakan wujud kepedulian pemerintah untuk mensejahterahkan kehidupan rakyat. Sebagaimana yang menjadi visi pembangunan nasional 1999-2004 yang tertuang dalam GBHN, yaitu terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermanfaat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu pangan sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.

Dalam fiqih siyasah telah diatur bahwa Pemerintah adalah sebagai pemimpin dalam masyarakat dalam arti yang luas bertanggung jawab terhadap keadaan rakyatnya. Sebagaimana terdapat dalam Sabda Nabi SAW yang berbunyi :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والامام راع ومسؤول عن
رعيته (رواه البخاري ,مسليم و ترمذ)

Artinya : “ Dari Abdullah Bin Umar ra. Berkata : Saya mendengar Ra setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya (HR. Bukhari, Muslim dan Turmudzi)”.²⁰

Hadits di atas menyatakan bahawa tiap-tiap manusia adalah pemimpin dan pemimpin bagi segala hal yang ada dibawah wewenangnya sesuai dengan tingkatan dan kedudukan masing-masing, baik formal maupun non formal. Pemerintah sebagai pemimpin juga bertanggung jawab untuk memperhatikan kemaslahatan rakyatnya, seperti dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tanggal 1 Oktober 2005 menambah beban hidup dan kehidupan masyarakat terutama masyarakat miskin, perhatian pemerintah dengan memberikan program kompensasi pengurangan subsidi BBM yang dikenal dengan program BLT. Karena antara pemimpin dengan rakyat ibarat wali dengan anak yatim. Sebagaimana qaidah yang menyatakan :

منزلة الامام من الرعية منزلة الولي من اليتيم .

Artianya ; “Fungsi pemimpin disisi rakyatnya bagaikan fungsi wali disisi anak yatim”.²¹

Qaidah ini memberi sugesti kepada setiap pemimpin agar selalu mengemban amanat penderitaan umat/rakyat dan petunjuk baginya dalam mengatur masyarakat hendaknya memperhatikan kemaslahatan

²⁰ Fu’ad Abdul Baqi, *Al Lu’lual Marjan*, (Semarang : Ar-Ridha, 1999), Cet. ke-2, Jilid III, h. 261

²¹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Al Ma’arif, 1993), Cet. ke- 2. h. 527

masyarakatnya. Karena antara masyarakat dengan pemimpin di ibaratkan sebagai suatu ikatan yang amat kuat seperti wali dengan anak yatim. Oleh karena itu, di dalam *siyasah maliyah* ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintah atau penguasa. Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang-orang kaya dan orang miskin. Didalam *siyasah maliyah* dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan-kebijakan yang harus diambil untuk mengorientasikan dua kelompok ini, agar kesejahteraan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.²² Dengan demikian halnya dalam program Bantuan Langsung Tunai merupakan kebijakan pemimpin atas rakyatnya semua itu di tentukan berdasarkan maslahat yang di timbulkan. Sebagaimana kaedah ushul fiqih mengatakan yang artinya “*Kebijaksanaan pemimpin atas rakyatnya di tentukan berdasarkan maslahat*”²³

Penjelasan kaedah tersebut adalah bahwa kebijakan dan keputusan pemimpin wajib di bangun berdasarkan dan untuk mencapai maslahat umum.

Bantuan yang diberikan itu sangat berguna untuk mengatasi atau membantu kelompok masyarakat yang pendapatannya terganggu akibat perubahan sosial. Bantuan kepada mereka yang lemah atau miskin atau yang merlukan bantuan dapat berupa kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan dan obat-obatan serta pendidikan dan lain sebagainya.

Untuk di Desa Koto Tuo, pemerintah memberi bantuan untuk memenuhi kebutuhan berupa Bantuan Langsung Tunai yang dikenal dengan

²² A.Dzajuli, *op. cit*

²³ Jaih Mubarak, *Kaidah Ushul Fiqih: Sejarah Dan Kaidah Asasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Cet. ke-1, h. 164

istilah (BLT) (*unconditional cash transfer*) yang diberikan berupa uang tunai. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu atau miskin.

Program BLT diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang terkena imbas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menambah beban hidup dan kehidupan masyarakat. Dalam hal memberi bantuan hendaklah betul-betul sampai kepada masyarakat miskin yang menurut ketentuan yang telah ditetapkan (terdaftar di BPS, 14 kriteria dan besarnya bantuan tersebut adalah Rp. 300.000,- pertiga bulan.)

Masyarakat yang di bawah garis kemiskinan di Desa Koto Tuo sangat banyak. Dikarenakan masyarakat miskin ini banyak maka perlu diadakannya penyeleksian yang dalam hal ini dilakukan oleh RT/RW masing-masing dengan menetapkan kebijakan penentuan kriteria sendiri karena kriteria yang ditetapkan pemerintah tidak cocok dengan data lapangan.

Di dalam penentuan kriteria tersebut, masyarakat miskin yang berhak mendapatkan BLT harus memenuhi syarat sebagai masyarakat miskin, seperti masyarakat yang mempunyai pekerjaan tidak tetap atau pekerja lepas yang penghasilannya tidak mencukupi untuk biaya hidup anggota keluarganya yang banyak dan bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan karena kondisi fisiknya, seperti sakit, udzur dari cacat dan lain-lain.

Namun kenyataannya di Desa Koto Tuo yang menerima bantuan BLT yang telah terdaftar dan juga yang tidak terdaftar di BPS. Sebagaimana dapat dilihat bahwa masyarakat miskin yang terdaftar (BPS) di Desa Koto Tuo pada

tahun 2008 adalah 281 K.K dan 98 dari kebijakan pemerintahan Desa Koto Tuo. Jadi masyarakat yang menerima bantuan BLT berjumlah dari 379 KK, dan yang terdapat di dalamnya adalah masyarakat miskin yang terdaftar di BPS dan masyarakat miskin melalui kebijakan pemerintahan desa. Sehingga BLT yang telah diperuntukkan bagi 379 KK harus dibagi bervariasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam musyawarah Desa.

Hal ini sudah tentu dapat dibayangkan bahwa bagian atau jatah untuk 281 KK yang terdaftar di tambah dengan daftar miskin dari kebijakan pemerintahan desa berubah atau berkurang dari semestinya, yaitu Rp. 300.000 menjadi Rp. 150.000 -100.000,-.

Adapun kebijakan pemerintah desa tidak amanah atau berlawanan dengan hukum yang tertinggi, yang mana hukum yang tertinggi tidak dapat dibatalkan oleh hukum yang lebih rendah. Dalam artian hukum yang dibuat oleh lembaga yang lebih tinggi tidak bisa dibatalkan oleh hukum yang dibuat oleh lembaga yang lebih rendah. Seharusnya kriteria dan daftar nama BLT yang telah ditetapkan oleh BPS yang menerima sebanyak 281 KK di Desa Koto Tuo, mereka itulah yang berhak menerima sebanyak Rp 300.000 tiap 3 bulan dan tidak ada pengurangan, pemotongan dan penambahan masyarakat miskin.

Dalam Islam hal ini dilarang karena bantuan yang telah ada tersebut hanyalah untuk nama-nama yang telah terdaftar (281KK). Jadi kepada mereka sajalah hendaknya bantuan itu diberikan, karena itu merupakan hak mereka yang telah terdaftar tersebut. Dalam hal yang menjadi hak mereka hendaknya

disampaikan kepada mereka pula karena itu adalah amanah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam. Surat An Nisa' ayat 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.. (QS. An Nisa': 58)

Kata amanah dalam ayat diatas mempunyai maksud yaitu sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.²⁴. Dan seruan untuk menyampaikan amanah juga terdapat dalam hadits yang berbunyi:

ادالامانة الى من تتمنك ولا تخن من خا نك

Artinya :“Sempurnakanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan janganlah engkau mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu” (HR. Ahmad dan Ahli Sunan).²⁵

Jadi pemerintah sebagai penyalur bantuan dalam hal ini hendaknya menyampaikan sesuai dengan kriteria kepada yang berhak menerima agar terciptanya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dan Islam juga menghendaki sebagai lembaga penetapan kriteria atau syarat penerima bantuan yang telah ditunjuk dan merupakan suatu kepercayaan yang sangat berharga hendaknya dapat berlaku jujur, tanggung jawab, dan adil. Sebagaimana terdapat dalam hadits :

²⁴ Depertemen Agama RI, *op. cit.*, h. 128.

²⁵ Fu'ad Abdul Baqi', *op. cit.* h. 267

عن ابي موسى وهو عبد الله بن قيس الا شعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الخازن الا من الذي يعطى ما امر به كما ملا موفرا طيبة نفسه , حت يدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Dari Abi Musa Abdullah bin Qays al As’ari Ra dia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya bendahara yang jujur yang memberikan apa yang telah diperintahkan kepadanya dengan sempurna, cakap, lagi berjiwa bersih, lalu menyerahkannya kepada orang yang diperintahkan untuk menerimanya, maka dia adalah termasuk salah seorang yang bersedekah juga”. (Hadits Riwayat Bukhari, Muslim dan An-Nasa’i).²⁶

Hadits di atas menyatakan bahwa seseorang pemimpin atau bawahan diperintahkan untuk berlaku jujur, sempurna, cakap, berjiwa bersih dan betul-betul menyerahkannya kepada yang berhak menerima dan perbuatannya itu akan mendapatkan pahala. Jadi dengan kata lain pemerintah/bawahannya sebagai penyalur bantuan BLT kepada masyarakat miskin yang membutuhkan harus bertanggung jawab, jujur dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya.

Disamping itu jika terjadi penambahan masyarakat penerima bantuan BLT, maka hendaknya dibuat daftar baru masyarakat penerima BLT selanjutnya. Kemudian daftar itu disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan proses kembali tanpa mempengaruhi yang terdahulu. Sehingga mereka mempunyai bagian tersendiri sesuai dengan yang diturunkan oleh pihak yang berwenang

²⁶ H.Bey Arifin, Dkk, *Terjemah Sunan Abi Daud*, (Semarang : As syfa', 1992) h. 464

Dalam fiqih siyasah maliyah untuk kriteria penerima bantuan/pemberian pemerintah terhadap rakyat tidak ada ketetapan kriteria miskin, tapi hanya menyebutkan fakir miskin sumber dasar sebagaimana pengertian miskin yang dikemukakan oleh Imam Malik, “orang yang untuk keperluan hidupnya tidak segan-segan meminta bantuan orang lain”. Pengertian ini sama dengan pengertian miskin menurut Abu Hanifah, dimana miskin lebih banyak/sangat membutuhkan daripada fakir.²⁷

Pada masa khalifah Umar Bin Khattab sumber subsidi/bantuan ini adalah penambahan pemasukan pajak, *khraj*, *jizyah*, dan harta *fai*. Sistem ini tidak memakai harta zakat, karena harta zakat dibagikan menurut distrik dan tidak diberikan kepada Baitul Mal, kecuali kelebihan di pakai untuk untuk masyarakat yang membutuhkan seperti orang miskin. Tugas Baitul Mal hanya membagikan harta kepada orang yang menjadi penerima dan juga harus mengembalikan harta sesuai dengan kemaslahatan umum. Karena di dalam harta yang dikumpulkan terdapat hak-hak fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya, tujuannya adalah untuk kemaslahatan umum.²⁸

²⁷ A. Djazuli, *op. cit.*, h. 247-348

²⁸ Ibrahim Quthb, *loc.cit.*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dasar penetapan Bantuan langsung Tunai (BLT) berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun kriteria penerima BLT yang telah ditetapkan BPS 14 kriteria, kecuali anggota rumah tangga yang bekerja sebagai PNS, anggota TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD, pensiunan PNS/TNI/ Polri, maka keluarga tersebut tidak berhak mendapat BLT.

Dalam penyalurannya terjadi ketidak sesuain antara kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan kondisi di lapangan, pemerintah desa mengambil kebijakan dalam menetapkan kriteria atau syarat bagi penerima BLT, dari hasil musyawarah RT/RW yang disepakati dalam agenda musyawarah Desa, diambil kesimpulan bahwa masyarakat miskin di Desa Koto Tuo yang berhak mendapatkan BLT adalah :

- a. Kelompok Miskin A, adalah Sangat Miskin, yaitu masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau pekerjaan lepas atau

Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan karena kondisi fisiknya, seperti udzur, cacat, sakit.

- b. Kelompok Miskin B, yaitu mendekati/hampir Miskin, Masyarakat yang mempunyai pekerjaan tetap, tetapi penghasilannya tidak tetap.

Namun kenyataannya di Desa Koto Tuo yang menerima bantuan BLT adalah masyarakat miskin yang terdaftar di BPS dan juga yang tidak terdaftar di BPS atau kebijakan pemerintah desa setempat. Hal ini sudah tentu bahwa bagian atau jatah untuk 281 KK yang terdaftar di BPS ditambah dengan daftar miskin dari kebijakan pemerintahan desa 98 KK, sehingga masyarakat miskin menerima bervariasi yaitu Rp. 300.000,-, Rp. 150.000, Rp.100.000,- menurut ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Kantor POS yang mempunyai peran utama dalam masalah BLT ini akan mengadakan proses penyaluran BLT, BPS kabupaten membentuk tim penyaluran KKB di tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Masing-masing difasilitasi oleh Bupati, Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun. Kantor Pos Bayar tersebut melakukan penarikan dana dari BRI Pusat dan menyalurkan dana tersebut kepada rumah tangga miskin sesuai dengan data yang ada Pos Bayar dan penyaluran dana oleh kantor pos Bayar dilakukan setelah kantor pos bayar melakukan verifikasi mengenai kebenaran dan keabsahan data yang diterima.
3. Dalam fiqh siyasah telah diatur bahwa Pemerintah adalah sebagai pemimpin dalam masyarakat bertanggung jawab terhadap keadaan rakyatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya : *“setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang*

dipimpinnya. Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya”. (HR. Bukhari, Muslim dan Turmudzi). Di dalam *siyasah maliyah* ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintah atau penguasa. Di kalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang-orang kaya dan orang miskin. Didalam *siyasah maliyah* dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan-kebijakan yang harus diambil untuk mengorientasikan dua kelompok ini, agar kesejahteraan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.

Dalam fiqh siyasah maliyah untuk kriteria penerima bantuan/pemberian pemerintah terhdap rakyat tidak ada ketetapan kriteria miskin secara terinci, tapi hanya menyebutkan fakir miskin sumber dasar sebagaimana pengertian miskin yang dikemukakan oleh Imam Malik, “orang yang untuk memenuhi keperluan hidupnya tidak segan-segan meminta bantuan orang lain”. Pengertian ini sama dengan pengertian miskin menurut Abu Hanifah, dimana miskin lebih banyak/sangat membutuhkan daripada fakir.

Pada masa khalifah Umar Bin Khattab sumber subsidi/bantuan di kumpulkan di Baitul Mal. Tugas Baitul Mal, hanya membagikan harta kepada orang yang menjadi penerima dan juga harus mengembalikan harta sesuai dengan kemaslahatan umum. Karena di dalam harta yang dikumpulkan terdapat hak-hak fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya, tujuannya adalah untuk kemaslahatan umum

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis dilakukan, maka penulis mengharapkan kepada pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), BKKBN, lembaga-lembaga pemerintah, masyarakat yang berperan dalam program ini.

1. Bantuan BLT tersebut hendaknya diberikan kepada masyarakat miskin yang betul-betul membutuhkan dan bagi masyarakat yang mampu jangan ikut berkopetisi untuk mendapatkan bantuan tersebut.
2. Jika terjadi penambahan penerima bantuan BLT hendaknya di daftarkan baru kembali, sehingga bagian mereka yang telah ditentukan tidak dikurangi atau tetap utuh.
3. Dalam penetapan kriteria penerima BLT betul-betul cocok dengan situasi di lapangan dan tepat sasaran, sehingga tidak meyusahkan pemerintahan desa dalam mengambil kebijakan-kebijakan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Syaid Ahal, *Umar Bin Abdul Azaiz Negarawan Yang Shaleh*, Pustaraka Firdaus: Jakarta, 20002, Cet. 2
- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu syariah*, Bandung: Kencana, 2003, Cet. 1
- Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan/Pentafsiran Al-Quran: Jakarta, 1971.
- "Dampak Psikososial Bantuan Langsung Tunai (BLT)" Artikel diakses dari internet dengan alamat website :<http://www.sinar-harapan.co.id/203/makalah-essai/2007> pada hari Kamis, 26 Juni 2008 Pkl. 15.00 WIB.
- Fu'ad Abdul Baqi, *Al Lu'lual Marjan*, Semarang : Ar-Ridha, 1999
- Hadi Prayitno, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta : Ghalia Indonesi, 1996, Cet. 1
- H.Bey Arifin, Dkk, *Terjemah sunan Abi Dawd*, Semarang : As Syfa', 1992
- Ibrahim Quthb, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab*, Pustaka Azzam: Jakarta, 2002, Cet. 2
- Indra J. Pilliang, "*Bantuan Langsung Tunai (BLT), Gratis Namun Dilematis*", artikel diterbitkan Harian Kompas pada tanggal 25 Mei 2008, halaman 7 Kolom 3.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran
- Jaih Mubarak, *Kaidah Ushul Fiqih: Sejarah Dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.1
- Keputusan Menteri Sosial RI, No. 23/Huk/1996 Tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Jakarta : DEPSOS RI, 1996, Cet. 3
- Keputusan Presiden RI, Nomor 12 tahun 2005 Tanggal 10 September 2005. *Tentang Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin*
- "Kebijakan Fiskal Dalam Pembangunan Pro Rakyat", Artikel diakses dari internet dengan alamat website : <http://www.forumteologi.org/2836/blt-kemiskinan/2008> pada hari Kamis, 26 Juni 2008 Pkl. 15.30 WIB.

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung : Al Ma'arif, 1993, Cet. 2

Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002, Cet. 1

T. Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 1995, Cet. 9

Undang-Undang Dasar 1945 dan Amendemen Kabinet Indonesia Bersatu Periode 2004-2009.



Hidup Adalah Sebuah Tantangan Yang Harus Kita Hadapi,
Ada Senang Dan Ada Susah, Tapi Bagaimana Kita
Menghadapi Hidup itu sediri.

Jangan Pernah Takut Menghadapi Kegagalan!
Apapun Bentuk Kegagalan Kita, Besar Atau Kecil,
Jadikanlah Pelajaran Dan Hikmah Yang Dapat kita Petik
Agar Kita Lebih Dewasa Dan Bijaksan, Sehingga
Berhati-Hati Dalam Langkah
Berikutnya.

Jangan Anggap Kegagalan Sebagai Keputus Asaan,
Tapi Jadikanlah Kegagalan Membuat Kita Memodifikasi Reaksi
Dan Strategi Untuk Terus Berrusaha Mencapai Tujuan
Merubah Dari Kegagalan Menjadi
Kesuksesan.

Orang Yang Sukses Di Mulai Dari Kegagal,
Tidak Satupun Manusia Yang Sukses
Tampa Dimulai Dengan Kegagalan

Kerjakanlah Apa Yang Kamu Bisa Kerjakan Hari Ini
Dan Jangan Tunda Hari Esok.
Santai, Tapi Pasti !!!!!!!!

BY: ARMAN



BIOGRAFI



Arman, Lahir di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Provinsi Riau pada tanggal 08 September 1985 dari sepasang suami istri Syafri dan Simawati. Anak ke dua dari tiga bersaudara.

Pendidikan formal SD 008 Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan menerus pendidikan ke Pondok Pesantren Daarun Nadha Thawalib Bangkinang (PP-DNTB) Selama 7 tahun. Dan setelah itu meneruskan ke jenjang perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum dengan Jurusan Siyasaah Jinayah (JS) Strata SI.

Pada tahun 2009/2010 telah dapat menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dengan judul karya ilmiah *“Problematika Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Menuru Fiqih Siyasaah”* dengan Indek Prestai sangat memuaskan (3.39).

DAFTAR TEBEL

TABEL I	: Kalsifikasi Penduduk Koto Tuo Menurut Jenis Kelamin -----	18
TABEL II	: Klasifikasi Jumlah Penduduk Desa Koto Tuo Menurut Kelompok Umur-----	18
TABEL III	: Klasifikasi Penduduk Koto Tuo Menurut Etnis-----	19
TEBEL IV	: Jumlah Penduduk Desa Koto Tuo Menurut Agama Yang Di Anut -----	20
TEBEL V	: Jumlah Penduduk Desa Koto Tuo Menurut Tingkat Pendidikan -----	22
TABEL VI	: Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Desa Koto Tuo -----	23
TABEL VII	: Jumlah Penduduk Desa Koto Tuo Menurut Mata Pencaharian -----	24
TABEL I	: Tanggapan Masyarakat Mengenai Kriteria Penerima BLT -----	45
TABEL II	: Keadaan Pekerjaan Penerima Bantuan Langsunga Tunai di Desa Koto Tuo -----	46
TABEL III	: Jumlah Pendapatan Penerima Bantuan Langsung Tunai Di Desa Koto Tuo-----	47
TABEL IV	: Jumlah Anggota Keluarga Yang Di Tanggung Masyarakat Penerima BLT -----	48
TABEL V	: Tanggapan Masyarakat Penerima BLT Di Desa Koto Tuo -----	49
TABEL V I	: Jumlah Bantuan Langsung Tunai Yang Diterima Masyarakat miskin tahun2008 -----	50
TABEL VII	: Tanggapan Masyarakat Tentang Besarnya BLT Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Sebulan -----	52
TABEL VIII	: Pendapat Masyarakat Manfaat Bantuan Lansung Tunai -----	53

DAFTAR ANGKET

iv

A. Ketentuan Angket :

- Angket ini hanya bertujuan semata-mata untuk penelitian ilmiah.
- Pengisian angket ini tidak ada hubungannya dengan study dan pekerjaan anda.
- Pengisian secara jujur sangat diharapkan menurut keadaan yang sebenarnya.
- Pilihlah jawaban yang menurut anda paling tepat dari beberapa jawaban yang disediakan dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B dan C.
- Atas bantuannya dalam mengisi angket ini penulis ucapkan terima kasih.

B. Daftar Pertanyaan

1. Apa pekerjaan Bapak/Ibu tekuni /lakukan sekarang ?
 - a. Tani
 - b. Pedagang
 - c. Buruh
 - d. Nelayan
 - e. Ibu rumh tangga
 - f. Pekerjaan tidak menetap
2. Berapa penghasilan Bapak/Ibu setiap minggu ?
 - a. Rp. 500.000 kebawah
 - b. Rp. 500.000 ke atas
 - c. Rp. 1.000.000 ke atas
3. Berapa jumlah anggota keluarga Bapak /Ibu Tanggung?
 - a. 2orang
 - b. 4orang
 - c. 3 orang
 - d. 6 orang
 - e. 5 orong

4. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap program Pemerintah Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2008?
 - a. Baik sekali
 - b. Baik
5. Menurut bapak/ibu, bagaimana penyaluran BLT sesuai dengan criteria yang telah ditetapkan pemerintah?
 - a. Sesuai
 - b. Tidak sesuai
6. Berapa besar jumlah (Rp) Bapak/Ibu terima dari bantuan BLT pada tahun 2008?
 - a. Rp. 300.000
 - b. Rp. 200.000
 - c. Rp. 150.000
 - d. Rp.100.000 ke bawah
7. Apakah Bapak/Ibu merasa puas dengan bantuan BLT yang telah di tetapkan pemerintah ?
 - a. bermanfaat
 - b. sangat bermanfaat
 - c. Kurang Puas

Alasan bermanfaat :.....
Alasan sangat bermanfaat :.....

8. Apakah dengan adanya program Bantuna Langsung Tuanai (BLT) Bapak/ Ibu terbantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya?
 - a. Cukup
 - b. Kurang cukup

Alasan Cukup:.....
Alasan Kurang Cukup :.....

9. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dengan adanya BLT ini, apakah dapat memenuhi biaya hidup selama sebulan?
 - a. Cukup sekali
 - b. Kurang cukup
 - c. Tidak cukup

PENDOMAN WAWANCARA

1. Apa criteria/syarat untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai?
2. Langkah-langkah apa yang bapak ambil apabila criteria dalam penerimaan BLT tidak cocok yang telah di tetapkan pemerintah?
3. Bagaimana cara Bapak menetapkan atau kriteria masyarakat tersebut layak atau tidak menerima BLT?
4. Faktor-Faktor apa yang menyebabkan masyarakat layak menerima BLT?
5. Berapa besar jumlah (Rp) bantuan BLT ini sampai ketangan masyarakat miskin apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak ?
6. Setelah Bapak menetapkan penerima BLT, bagaiman proses penyalurannya?

7. Menurut bapak, apa ada kendala-kendala dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar?

PEDOMAN OBSERVASI

1. Melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai
 - Melihat daftar nama –nama penerima bantuan langsung tunai
 - Melihat pelaksanaan pengambilan dana BLT di kantor POS cabang
 - Melihat kartu konpesasi BBM (KKB)
2. Melihat keadaan dan kondisi masyarakat penerima bantuan langsung tunai

